



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# MANUAL INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 16.1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Utama BKN, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029.**

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

## **Pasal 1**

- (1) Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Peta Strategi dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara.

## **Pasal 2**

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara wajib:

- 1) Menyusun Perencanaan Strategis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang diimplementasikan secara komprehensif pada semua level unit organisasi, satuan kerja dan kantor regional BKN.
- 2) Menyusun Peta Strategis dan IKU di lingkungan unit kerja, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang- kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN.

- 3) Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan unit kerja masing- masing sekurang- kurangnya pada setiap triwulan; dan
- 4) Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari unit organisasi, satuan kerja, dan kantor regional BKN masing- masing yang memiliki kontribusi atas IKU Badan Kepegawaian Negara.

### **Pasal 3**

Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2025

**SEKRETARIS UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

\$

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

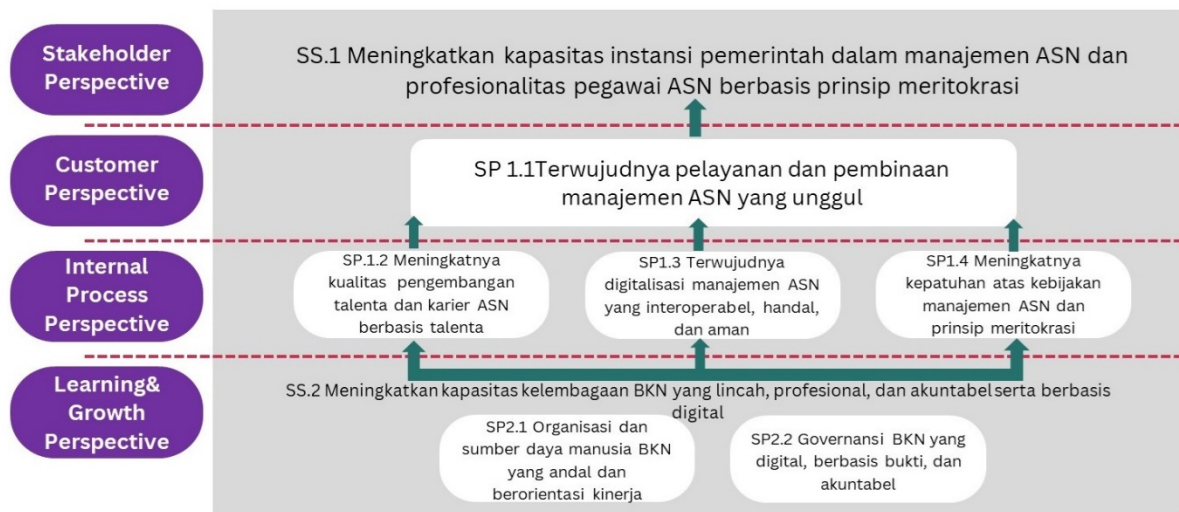


## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

### SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis BKN merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKN yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh hasil dari program BKN. Penyusunan sasaran strategis BKN menggunakan model *Balanced Scorecard* (BSC). Sekretariat Utama memiliki tanggung jawab pada aspek *Learning & Growth Perspective*.

#### PETA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025-2029



*Learning & Growth Perspective* merupakan gambaran atas optimalnya organisasi BKN dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam “Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital”. Rumusan ini dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis diposisikan sebagai Sasaran Strategis 2, dengan indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BKN. Lebih lanjut, sasaran strategis ini didukung oleh sasaran program sebagai berikut:

- 1) SP 2.1 – Organisasi dan sumber daya manusia BKN yang andal dan berorientasi kinerja

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

- a. Skor evaluasi AKIP BKN;
  - b. Indeks Sistem Merit BKN.
- 2) SP 2.2 – Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel
- a. Opini BPK atas laporan keuangan BKN;
  - b. Indeks SPBE BKN;
  - c. Level maturitas SPIP Terintegrasi BKN

#### INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025- 2029

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai Reformasi Birokrasi BKN	83	85	87	89	91
2	Skor Evaluasi SAKIP BKN	72,5	75	77,5	80	82,5
3	Nilai Sistem Merit BKN	380	385	385	390	390
4	Skor Evaluasi SAKIP Sekretariat Utama BKN	71	72	73	74	75
5	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Utama BKN	87	90	92	95	97
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks SPBE BKN	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
8	Level Maturitas SPIP Terintegrasi BKN	4	4	4	4	4
9	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Sekretariat Utama	100	100	100	100	100
10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama	95	95	96	96	97
11	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN	93,25	93,50	93,75	94	94,25

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### IKP 1. Nilai Reformasi Birokrasi BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kapabilitas kelembagaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang lincah, profesional, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis digital, BKN terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen ASN yang efisien dan terintegrasi, termasuk layanan administrasi dan pengelolaan data ASN. Transformasi ini diharapkan mendorong peningkatan kecepatan dan transparansi serta akurasi, sehingga memperkuat kedudukan BKN sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan tata kelola Manajemen ASN yang adaptif dan terpercaya.
Indikator Kinerja Utama	Nilai Reformasi Birokrasi BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Definisi :</p> <p>Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta PermenPANRB No 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KemenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Makna reformasi birokrasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan;</li> <li>2. Pertaruhan besar organisasi dalam menghadapi tantangan abad ke-21;</li> <li>3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih</li> </ol>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

	<p>antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang cukup besar;</p> <p>4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa</p> <p>5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.</p>
	Formula :
	Hasil penilaian oleh Kemenpan RB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN
	Tujuan :
	Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output ( X ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	( ) Tinggi ( X ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( X ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( X ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN oleh KemenpanRB
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Raw Data ( X ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu dan mengklasifikasi rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi penilaian indikator pada tingkat meso sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>2. Memastikan setiap indikator dalam penilaian reformasi birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen kinerja unit kerja terkait;</li> <li>3. Membentuk tim kerja dalam rangka penyiapan kebijakan sebagai bentuk antisipasi perubahan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka memastikan rencana aksi yang telah disusun dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.</li> </ol>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### IKP 2. Skor Evaluasi SAKIP BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Skor Evaluasi SAKIP BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	<p>Definisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan untuk mengukur implementasi Sistem AKIP (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.</li> <li>• Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</li> <li>• SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.</li> <li>• Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh KemenPAN-RB dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>• Hasil evaluasi AKIP terbagi menjadi 7 predikat sebagai berikut:</li> </ul>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (&gt;90 - 100) Sangat Memuaskan</li> <li>2. A (&gt;80 - 90) Memuaskan</li> <li>3. BB (&gt;70 - 80) Sangat Baik</li> <li>4. B (&gt;60 - 70) Baik</li> <li>5. CC (&gt;50 - 60) Cukup (Memadai)</li> <li>6. C (&gt;40 - 50) Kurang</li> <li>7. D (&gt;0 - 30) Sangat Kurang</li> </ol>
	Formula :
	Hasil penilaian oleh KemenPAN-RB yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BKN oleh KemenpanRB
	Tujuan :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di BKN</li> <li>2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di BKN</li> <li>3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di BKN</li> <li>5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya</li> </ol>
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	( X ) Kuantitas/output ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	( X ) Tinggi ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	( ) Lead input ( X ) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( X ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerjasama
Sumber Data	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja BKN oleh Kementerian PANRB
Jenis Penghitungan	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

**LEVEL 1**  
**SEKRETARIAT UTAMA**

Data	
Status Data	( X ) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan teknologi informasi untuk manajemen kinerja unit (MAKO)</li><li>2. Menyusun pohon kinerja dengan mencerminkan tugas dan fungsi sesuai mandat peraturan perundang-undangan</li></ol>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### IKP 3. Nilai Sistem Merit BKN

Perspektif	Learn and Growth Perspective
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Nilai Sistem Merit BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks Pelaksanaan Sistem Merit BKN adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan Sistem Merit di lingkungan BKN yang disebutkan di dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang PNS, mulai dari Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta Sistem Informasi.
	Formula :
	Penilaian Sistem Merit dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan kategori: Kategori I (100-174) = Buruk Kategori II ( 175-249) = Kurang Kategori III ( 250-324) = Baik Kategori IV (325-400) = Sangat Baik
	Tujuan :

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

	Mewujudkan ASN BKN yang berkualitas yakni ASN BKN yang berkompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi
Satuan Pengukuran	Nilai (Kategori)
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output ( X ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	( ) Tinggi ( X ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	( ) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( X ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( X ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sumber Data	Hasil Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Raw Data ( X ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	Perbaikan pada komponen pelaksanaan Sistem Merit di BKN

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

### **IKP 4. Skor Evaluasi SAKIP Sekretariat Utama BKN**

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Skor Evaluasi SAKIP Sekretariat Utama BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	<p>Definisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</li> <li>• Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</li> <li>• SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.</li> <li>• Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

	Formula :
	Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BKN
	Tujuan :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN;</li> <li>2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN;</li> <li>3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Sekretariat Utama BKN;</li> <li>5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.</li> </ol>
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output ( X ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	( ) Tinggi ( X ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	( ) Lead input ( X ) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( X ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Umum, Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat BKN
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( X ) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( X ) Maximize ( ) Minimize ( )

**LEVEL 1**  
**SEKRETARIAT UTAMA**

	Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	Fasilitasi dan pendampingan Tim Akuntabilitas Kinerja dalam monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

### IKP 5. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Utama BKN

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja
Deskripsi Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia BKN yang Andal dan Berorientasi Kinerja merupakan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran.
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Utama BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks yang diukur sesuai dengan Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, dan Biro Perencanaan dan Organisasi
	Formula :
	<p>Perhitungan nilai indeks mengacu pada pengumpulan nilai indeks dari semua unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Utama</p> $N = \frac{A+B+C+D+E}{5}$ <p>N = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Utama  A = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Umum  B = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Keuangan  C = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro SDM dan Organisasi  D = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi Publik  E = Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Biro Perencanaan dan Kerjasama</p>

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

	Tujuan :
	Untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Utama
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	( ) Tinggi (X) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	( ) Lead input (X) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit (X) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Biro Perencanaan dan Kerjasama
Sumber Data	Laporan rekapitulasi Survei Kepuasan di lingkungan Sekretariat Utama
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi (X) Rata-rata ( ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X) Semesteran ( ) Tahunan
Mitigasi risiko	Meningkatkan layanan sekretaris utama terhadap customer dan melakukan evaluasi kepada biro yang kurang maksimal memberikan layanan.

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### IKP 6. Opini BPK atas Laporan Keuangan BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran program	Governansi BKN yang digital, berbasis bukti, dan akuntabel bermakna bahwa diharapkan governansi BKN dapat berjalan dengan berbasis digital melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, berbasis bukti atau data dalam pembuatan kebijakan, dan mampu dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Program	Opini BPK atas Laporan Keuangan BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Opini Atas Laporan Keuangan BKN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
	Formula :
	Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah : 1. Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>Unqualified Opinion</i> ) 2. Wajar dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> ) 3. Tidak Wajar ( <i>Adversed Opinion</i> ) 4. Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer of Opinion</i> )
	Tujuan :
	Pencapaian prestasi terhadap kualitas Laporan Keuangan BKN
Satuan Pengukuran	Predikat

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	( ) Tinggi Rendah ( ) Sedang (X)
Tingkat Validitas IKP	(X) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Keuangan
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Raw Data (X) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan
Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan tertib administrasi laporan keuangan BKN</li> <li>Adanya proses verifikasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ol>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### IKP 7. Indeks SPBE BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Indeks SPBE BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indeks SPBE BKN merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBE di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kategori indeks SPBE sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1,8 : kurang</li> <li>1,8 – 2,6 : cukup</li> <li>2,6 – 3,5 : baik</li> <li>3,5 – 4,2 : sangat baik</li> <li>4,2 – 5,0 : memuaskan</li> </ul>
	Formula :
	Nilai indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Laporan Hasil Evaluasi Sistem

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

	Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Tujuan :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE di BKN</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE di BKN</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di BKN</li> </ol>
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output ( X ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	( ) Tinggi ( X ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	( ) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( X ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( X ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKN oleh KemenpanRB
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Raw Data ( X ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik</li> <li>2. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara periodik</li> </ol>

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

### IKP 8. Nilai Level Maturitas SPIP Terintegrasi BKN

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Nilai Level Maturitas SPIP Terintegrasi BKN
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.
	Formulasi :
	Formulasi penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

	<p>Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tingkat Maturitas</th> <th>Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td><math>1.0 \leq \text{Skor} &lt; 2.0</math></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td><math>2.0 \leq \text{Skor} &lt; 3.0</math></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td><math>3.0 \leq \text{Skor} &lt; 4.0</math></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terukur dan terkelola</td> <td><math>4.0 \leq \text{Skor} &lt; 4.5</math></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td><math>\geq 4.5</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>	No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Rintisan	$1.0 \leq \text{Skor} < 2.0$	2	Berkembang	$2.0 \leq \text{Skor} < 3.0$	3	Terdefinisi	$3.0 \leq \text{Skor} < 4.0$	4	Terukur dan terkelola	$4.0 \leq \text{Skor} < 4.5$	5	Optimum	$\geq 4.5$
No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor																	
1	Rintisan	$1.0 \leq \text{Skor} < 2.0$																	
2	Berkembang	$2.0 \leq \text{Skor} < 3.0$																	
3	Terdefinisi	$3.0 \leq \text{Skor} < 4.0$																	
4	Terukur dan terkelola	$4.0 \leq \text{Skor} < 4.5$																	
5	Optimum	$\geq 4.5$																	
Satuan Pengukuran	Level																		
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya																		
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi ( ) Sedang ( ) Rendah																		
Tingkat Validitas IKP	(X) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome																		
Jenis Cascading IKP	( X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading																		
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( X) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)																		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Inspektorat, Biro Perencanaan dan Organisasi																		
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP																		
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata ( X) Nilai Posisi																		

**LEVEL 1**  
**SEKRETARIAT UTAMA**

	Akhir
Status Data	( X ) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Potensi lingkungan pengendalian tidak berjalan secara optimal</li><li>2. Potensi ketidaktepatan penilaian risiko yang disusun oleh tim UPR</li><li>3. Potensi kegiatan pengendalian tidak terlaksana dan terdokumentasi dengan baik</li></ol>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### **IKP 9. Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Sekretariat Utama**

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	<p>Definisi :</p> <p>Suatu instrumen yang menggambarkan tindak lanjut (sampai dengan selesai) yang dilakukan oleh Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Utama atas temuan hasil audit/pemeriksaan keuangan, operasional dan kinerja.</p> <p>Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP.</p> <p>Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.</p>

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

	<p>Formula :</p> <p>Membandingkan jumlah temuan yang statusnya telah tuntas/ selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh temuan dari BPK dan Inspektorat</p> $N = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Ket :</p> <p><i>N = Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Utama</i></p> <p><i>A = Jumlah Temuan yang Statusnya telah Tuntas/Selesai ditindaklanjuti oleh Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Utama</i></p> <p><i>B = Jumlah Temuan dari BPK dan Inspektorat atas Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Utama</i></p>
	<p>Tujuan :</p> <p>Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Utama dalam memperbaiki tata kelola</p>
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	(X) Tinggi ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	(X) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Biro Perencanaan dan Kerjasama

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

Sumber Data	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Inspektorat/BPK yang dikeluarkan oleh Inspektorat setiap Semester
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X) Semesteran ( X ) Tahunan
Mitigasi risiko	Melakukan monitoring atas status temuan yang sudah di tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Inspektorat

## LEVEL 1

### SEKRETARIAT UTAMA

#### IKP 10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Sekretariat Utama

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Utama
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkup Settama BKN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran
	Formula :
	$PA = \frac{Ai}{An} \times 100\%$
	Ket: PA = <u>Persentasi Realisasi Penyerapan Anggaran</u> Ai = <u>Jumlah Serapan Anggaran dan Fisik</u> An = <u>Perencanaan Anggaran dan Fisik</u>
Satuan Pengukuran	Tujuan :
	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran maupun fisik yang sudah direncanakan sebelumnya
Satuan Pengukuran	Persentase (%)

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/output ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKP	<input checked="" type="checkbox"/> Tinggi ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKP	<input checked="" type="checkbox"/> Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKP	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung <input checked="" type="checkbox"/> Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Biro Perencanaan dan Kerjasama
Sumber Data	Laporan hasil penyerapan anggaran dan fisik keseluruhan unit di lingkungan Sekretariat Utama BKN
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Mitigasi risiko	1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan

**LEVEL 1**  
**SEKRETARIAT UTAMA**

**IKK 11. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKN**

Perspektif	<i>Learn and Growth Perspective</i>
Sasaran Program	Governansi BKN yang Digital, Berbasis Bukti dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran Program	Governansi BKN yang digital bermakna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKN mengedepankan digitalisasi melalui pemanfaatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Berbasis bukti berarti bahwa setiap tindakan pengambilan keputusan di BKN didasari atas fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Kinerja Program	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kepegawaian Negara
Deskripsi Indikator Kinerja Program	Definisi :
	Indikator IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implemntasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	Formula :
	1. Bobot Nilai Kinerja Per indikator

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

Aspek	No.	Indikator	Bobot	
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%
	2.	Devisi Halaman III DIPA	15%	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian Output	25%	25%
<b>Total</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

2. Perhitungan Konversi Bobot

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Keterangan :
  - Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai, dan
  - Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada K/L/Unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tujuan :

Untuk Memantau kualitas kinerja pelaksanaan anggaran BKN sebagai bahan evaluasi berkala

Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu

## LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA

	( ) Biaya		
Kualitas dan Tingkat Kendali	(√) Outcome	( ) Outcome Antara	( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKP	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading		
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKP	Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Kerjasama		
Sumber Data	Perolehan IKPA melalui aplikasi Om Span Kementerian Keuangan		
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir		
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Raw Data ( X ) Raw Data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize		
Periode Pelaporan	( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan		
Mitigasi risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan Kementerian Keuangan terkait secara berkala</li> <li>2. Memperhatikan Langkah-langkah Strategis Akhir Tahun</li> <li>3. Monitoring Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban dan Optimalisasi Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan</li> <li>4. Monitoring Data Kontrak</li> <li>5. Monitoring pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan</li> <li>6. Monitoring Ketepatan Waktu Pembayaran Tagihan Belanja</li> <li>7. Mengurangi Penumpukan Pencairan Dana pada Akhir tahun Anggaran</li> <li>8. Monitoring Pencapaian Output</li> </ol>		